

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

: bahwa dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, diundang perlu mewakilkan pembukaan dan pengajaran madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembinaan madrasah sejuta umatnya;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dakwah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen dengan sebagaimana perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 38 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengembangan Komunitas Organisasi Departemen Agama;

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Kersetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : II-112/1/1997 tanggal 20 Januari 1997.

H I M U T U S . A N

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN DAN PENIGERIAN MADRASAH.

Membuka dan meningkatkan Madrasah kelembagaan berdasarkan dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kadudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1970.

Kadudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1970.

Kadudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1970.

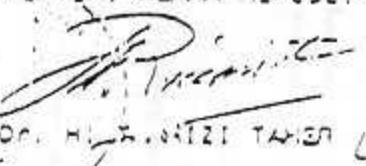
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.

Sejak bertakunnya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) madrasah. MADRASAH TSANAWIYAH Negeri bertambah dari 1023 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan MADRASAH ALIYAH Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. SYARIFUDDIN TAHER

Kepala Kassa;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
Menteri Dalam Negeri RI;
Menteri Keuangan RI;
Ketua IX DPR RI;
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
Dirjen/Ditjen Binbasja Islam/Ditjen Bimas Islam dan Urusan Agama/Dirjen/Kubalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
Puru Gubernur KCA Tingkat I seluruh Indonesia;
Puru Kepala Diro/Direktorat di lingkungan Ditjen Binbasja
Agama/Inspektorat/Kubalitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbasja
Agama/Kabudidiklat Pegawai;
Puru Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Distrik di seluruh Indonesia;
Puru Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;
Kantor Perbandaran dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
Diro Kultur dan Human Departemen Agama untuk dokumentasi
dan pengukuran untuk diketahui.